

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Kurang Mampu di Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni telah berjalan cukup efektif. Pemerintah desa melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai tujuan, proses, dan persyaratan program. Kejelasan informasi ini membantu masyarakat memahami maksud dari program serta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menjadi penerima bantuan. Komunikasi yang baik ini turut mendukung keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan program melibatkan sumber daya manusia yang terbatas, dengan hanya 10 orang aparat desa, yang kadang tidak hadir secara penuh di kantor desa. Dari sisi keuangan, dana berasal dari Dana Desa dan disalurkan dalam bentuk material. Namun, masih terdapat keluhan masyarakat terkait transparansi distribusi material dan pembiayaan tambahan seperti tukang yang ditanggung sendiri oleh penerima. Sarana prasarana seperti akses jalan dan air bersih masih menjadi tantangan. Di sisi waktu, keterlambatan pencairan dana

dan pengiriman material menyebabkan pembangunan memakan waktu lebih lama.

3. Sikap Pelaksana

Sikap para pelaksana program di Desa Jawapogo menunjukkan komitmen yang tinggi. Para aparat bekerja dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelayanan yang ramah dan prosedur yang dijalankan secara jujur serta dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat merasakan dampak positif dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan program ini telah didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan telah disosialisasikan kepada masyarakat. SOP membantu memberikan arah yang terstruktur bagi aparat desa dalam menjalankan program. Struktur birokrasi yang fleksibel juga mempermudah koordinasi dan pengawasan terhadap proses implementasi, serta membantu memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan secara sistematis dan sesuai prosedur.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran guna meningkatkan efektivitas implementasi program ke depannya:

1. Komunikasi

Pemerintah desa diharapkan terus meningkatkan intensitas komunikasi dua arah dengan masyarakat, terutama dalam hal verifikasi data calon penerima bantuan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Penggunaan media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat lebih luas

2. Sumber Daya

Perlu adanya peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Pemerintah desa juga sebaiknya lebih transparan dalam pengelolaan dana dan pendistribusian material, serta memperbaiki sarana pendukung seperti akses jalan agar distribusi bantuan berjalan lancar. Pelatihan untuk aparat desa dalam manajemen keuangan dan pengelolaan program juga sangat dianjurkan.

3. Sikap Pelaksana

Pemerintah desa dan pelaksana program perlu terus menjaga dan meningkatkan etos kerja, kejujuran, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Pelatihan berkala dan peningkatan kapasitas pelayanan publik sangat dianjurkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Mengadakan forum diskusi antara pelaksana dan masyarakat juga dapat memperbaiki hubungan dan meningkatkan kepercayaan.

4. Struktur Birokrasi

Diperlukan evaluasi rutin dan sosialisasi lanjutan terhadap SOP kepada seluruh aparat desa dan masyarakat penerima manfaat agar semua pihak memahami

prosedur pelaksanaan program. Dengan demikian, implementasi program dapat berlangsung lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, pengembangan sistem pelaporan yang transparan dan responsif terhadap masukan masyarakat juga perlu diperkuat.